

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory), Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Prenada Medi Group.
- Abdul Aziz Hakin, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar.
- Afan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bennard Arief Shidarta, 2003, *Apakah Teori Hukum Itu?*, Bandung, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- C.F Strong, 2011, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk, Terjemahan dari: Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative of Their History and Existing Form*, Bandung, Nusamedia.
- Franz Magnis Suseno, 2003, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Hendri J Schamandt, 2002, *Filsafat Politik, Kajian histories dari zaman Yunani kuno sampai zaman modern*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar.
- Hans Kelsen, 2013, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Catatan kedelapan, Nusamedia.
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2010, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, Jakarta, Refika Aditama.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2007, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- J. Prihatmoko, 2008, *Mendemokrasikan Pemilu; Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- J. Kaloh, 2008, *Demokrasi dan kearifan lokal pada pemilihan kepala daerah langsung*, Jakarta, Kata Hasta Pustaka.
- Jazim Hamidi, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, Total Media, 2009.
- Kacung Marijan, 2006, *Demokratisasi Di Daerah; Pelajaran Dari Pilkada Langsung*, Surabaya, Eureka dan Pusdeham.
- L. J. Van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Cetakan ketiga puluh, Pradya Paramita.
- Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara Indonesia*, Malang, PSS UB Malang.
- Munir Fuadi, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Jakarta, Rafika Aditama.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Cet. Ke enam, Rajawali Pers.
- Muchtar Kusumatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- Mirian Budiharjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Ni'matul Huda, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta, Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Otong Rosadi, 2012, *Studi Politik Hukum*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Thafa Media.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.

Sudono Syueb, 2008, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi*, Surabaya, Cetakan Pertama, Laksbang Media Tama.

Samsul Wahidin, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah, Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

\_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.

Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Cetakan ketigabelas, Rajawali Press.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Soewoto Mulyosudarmo, 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang, In-Trans.

Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Reviuw: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung*, Jakarta, Rajawali Pres.

## **JURNAL**

Abdul Mukhtie Fadjar, 2009, *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan PHPU*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.

Denny Indrayana, 2004, *Negara Hukum Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs. Korupsi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 1, Nomor 1, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.

Edi Toet Hedratno, 2014, *Polemik Pemilihan Kepala Daerah Pasca Ditetapkannya UU No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, Volume 1 Nomor 1 *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pancasila*.

Satya Arinanto, 2009, "*Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*", dalam *Mahkamah Konstitusi, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Pespektif*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.

Suharizal, 2010, *Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.

## **UNDANG-UNDANG**

UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Komite Nasional Daerah (Di umumkan pada tanggal 23 November 1945).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri (Di umumkan pada tanggal 10 Juli 1948).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1874 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

**PERATURAN PEMERINTAH**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).